



Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Aulya Purwitasari

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Binti Mutafarida

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Yuliani

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: aulyapurwita@email.com

Abstrak. *Infrastructure development and economic growth are two very important and related things. Infrastructure acts as a basis for economic activity, enabling the delivery of goods and services and increasing efficiency and productivity. Taxes are a form of government income that plays an important role in encouraging economic growth and infrastructure development. Taxes are used to finance infrastructure projects, improve infrastructure quality, and increase accessibility and efficiency of infrastructure use. This research aims to evaluate the urgency of taxes in encouraging infrastructure development and economic growth. The research method used is a literature review from various sources, namely books, journals, economic and infrastructure growth reports from BPS and other sources that support the data. The results of this research show that taxes are used to finance infrastructure development that has a positive impact on the economy, such as roads, bridges, irrigation, schools and other public facilities. However, Indonesia's tax revenues are still low compared to other countries in Southeast Asia. Tax-financed infrastructure development has shown positive impacts, such as increasing accessibility and efficiency of distribution of goods, increasing the competitiveness of the manufacturing sector through stable energy supply, and developing tourism. Adequate infrastructure also encourages sustainable economic growth and creates new jobs.*

Keywords: *Taxes, Infrastructure Development, and Economic Growth.*

Abstrak. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua hal yang sangat penting dan berkaitan. Infrastruktur berperan sebagai dasar bagi aktivitas ekonomi, memungkinkan pengiriman barang, dan jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pajak sebagai salah satu pendapatan pemerintah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan dalam membiayai proyek infrastruktur, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi pajak dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literature dari berbagai sumber yaitu dari buku, jurnal, Laporan Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dari BPS dan sumber lain yang mendukung data. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang berdampak positif pada ekonomi, seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Namun, penerimaan pajak Indonesia masih rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pajak telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang, peningkatan daya saing sektor manufaktur melalui stabilitas pasokan energi, serta perkembangan pariwisata. Infrastruktur yang memadai juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kata Kunci: *Pajak, Pembangunan Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua hal yang sangat penting dan berkaitan. Infrastruktur berperan sebagai dasar bagi aktivitas ekonomi, memungkinkan pengiriman barang, dan jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, biaya infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan menjaga kualitas sering tidak tercover oleh pendapatan yang diperoleh dari penggunaan infrastruktur tersebut. Kegiatan pembangunan ini dilakukan untuk pengembangan atau perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memiliki contoh salah satunya dari prasarana perhubungan salah satunya jalan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu negara. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat, karena akses jalan merupakan kunci dari mobilitas dari satu tempat ketempat lain juga kepentingan masyarakat daerah.

Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerang yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ketempat lain. Sebagaimana pengertian dari infrastruktur sendiri ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum dan menjadi kepentingan bersama yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonmi maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik.

Pajak sebagai salah satu pendapatan pemerintah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan dalam membiayai proyek infrastruktur, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 29145, pajak merupakan pendapatan nasional sebagai sumber dana pembayaran di daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang atau aturan hukum. Pajak merupakan peralihan kekayaan orang atau badan usaha ke kas negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual dan dapat dipaksakan dengan pembayaran berulang ulang atau sekaligus. Tujuan adanya pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan pemungutan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar 1. Infografik Penerimaan Perpajakan s.d Desember 2023



Sumber : Komite Pengawas Perpajakan

Pada 10 November 2023, ditetapkan Perpres 75/2023 yang mengubah Perpres 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Perpres 75/2023, target Pendapatan Negara tahun 2023 dinaikkan sebesar 7,1% dari target awal tahun 2023. Target penerimaan perpajakan juga dinaikkan yaitu sebesar 4,8%. Target penerimaan pajak dinaikkan sebesar 5,8% sedangkan target penerimaan kepabeanan dan cukai

diturunkan sebesar 1%. Selanjutnya target belanja negara dinaikkan sebesar 1,8%.. sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 2.155,42 triliun (101,75% dari taget pada Perpres 75/2023) tumbuh 5,94% . penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.869,23 triliun atau telah mencapai 102,80/5 terhadap target. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 8,88%. Kmponen PPh Non Migas berkontribusi paling besar dalam penerimaan pajak, di mana kontribusinya mencapai 53,1% terhadap realisasi penerimaan pajak Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 286,19 triliun atau telah memenuhi 95,36% dari target. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut turun 9,94%. Komponen cukai berkontribusi paling besar dalam penerimaan kepabeanan dan cukai, di mana kontribusinya mencapai 77,5% terhadap realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mardhiah terkait pengaruh pajak terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa mulai optimalnya pembayaran pajak yang diterima oleh badan penerima pajak, pemungutan yang dilakukan juga menurut Islam, telah melakukan pembangunan untuk wilayah yang sedikit jauh dari pusat pemerintahan, sehingga dengan adanya pemasukan dari pajak ini mampu membantu dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya Arfah Habib Saragih juga menunjukkan pada peneitiannya bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga penerimaan pajak harus dimanfaatkan untuk mendanai proyek yang produktif yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi pajak dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji urgensi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang diperdagangkan. Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara di dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum, pajak dapat dikatakan sebagai pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak yang tidak mendapatkan prestasi secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya fungsi pajak terdapat dua yaitu:

a. Fungsi *budgetair*/ Penerimaan

Merupakan fungsi utama pajak sebagai pemasukan negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara histori. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak

dari penduduknya. Memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

b. Fungsi *regularend/* regulasi

Fungsi ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetir oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya keseimbangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu pajak menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya:

a. Menurut sifatnya:

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan keadaan subjeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektnya
Contoh: Pajak penghasilan
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan

b. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung. Yaitu pajak yang pembebenannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan
Contoh: Pajak penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebenannya dapat dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai

c. Menurut Lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, merupakan pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara
Contoh: PPh, PPN, PPNBM, Bea materai, PBB, bea perolehan tanah dan bangunan
- 2) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pada pajak daerah terdapat 2 macam yaitu pajak provinsi yaitu pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan yang kedua adalah pajak kabupaten dan kota, yaitu pada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contohnya peningkatan perekonomian desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Syamsi Yuswar Zainul Bisri dan Mulyadi Suhri pembangunan adalah

proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu ke suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Menurut Ja'far infrastruktur memiliki peranan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor terkait. Infrastruktur seperti menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri. Pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan modal besar, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya. Terdapat tiga alasan pokok yang pembangunan infrastruktur itu penting.

- a. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya rakyat dan negara adil dan makmur
- b. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan capital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kapet, kawasan industri, pelabuhan, pasar-pasar dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru di bidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar
- c. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya
- d. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Karena isolasi wilayah hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga praktis hanya dikonsumsi anggota keluarga. Akibatnya tingkat pendapatan tetap rendah, kemudian mereka diklaim sebagai masyarakat miskin.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Proses ini menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengkaitkan aspek output total GDP dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti meningkatkan pendapatan nasional. Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB dan PNB riil. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Raharjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi

- A. Ketidakseimbangan pendapatan
- B. Perubahan struktur perekonomian
- C. Pertumbuhan kesempatan kerja
- D. Tingkat penyebaran kemudahan
- E. Produk domestik bruto

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literature dari berbagai sumber yaitu dari buku, jurnal, Laporan Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dari BPS dan sumber lain yang mendukung data. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan suatu topik penelitian terkait urgensi pajak dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak dalam beberapa bulan ini menjadi hal perhatian lebih dari pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui beberapa cara yang antara lain melalui pengampunan pajak (*tax amnesty*) sampai ekstensifikasi wajib pajak melalui penambahan jumlah NPWP yang disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah. Hal ini pasti menjadikan pro kontra di masyarakat, tentu pemerintah melakukan ini karena pengetahuan masyarakat terkait pajak masih kurang karena kesadaran untuk membayar pajak memang rendah. Sebagai contoh, bila seseorang bepergian untuk mengunjungi keluarga atau rekan bisnis ke suatu tempat tidaklah mungkin membuat jalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan, karena membuat jalan sebagai milik sendiri atau barang privat akan menjadi terlalu mahal. Mereka bisa menggunakan jalan umum sebagai barang publik yang disediakan pemerintah, yang pembangunannya bersumber dari pajak sehingga perekonomian menjadi lebih efisien. Alasan lain pajak diperlukan karena untuk memberikan penghasilan kepada pemerintah, mendistribusikan kekayaan dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin dan untuk menghindari eksternalitas negative akibat pembangunan.

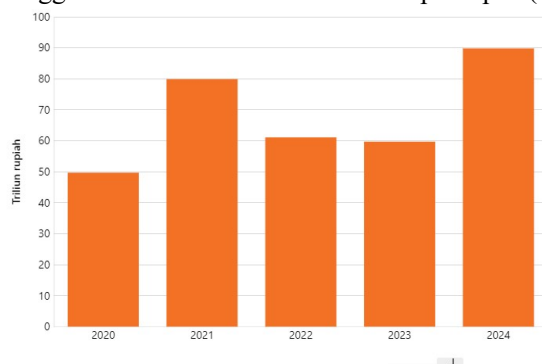
Uang yang diperoleh dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jembatan, jalan, irigasi, taman kota, sekolah, membayar gaji tentara, pegawai negeri, dana pensiun, kesehatan yang minimal mampu membiayai bidang penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut pajak memiliki peran penting dalam pembangunan, tanpa pajak mustahil pembangunan dapat terlaksana terutama yang menyangkut pembangunan barang publik yang tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan pajak beserta administrasinya berkembang terus dan penegakan hukum bagi yang membangkang membayar pajak terutama pada negara maju justru semakin tegas. Benjamin Franklin seorang politisi dan Founding Father Amerika menyampaikan bahwa “Di dunia ini tidak

ada sesuatu yang pasti, kecuali kematian dan pajak. Meskipun demikian, golongan liberalis secara prinsip menolak pemungutan pajak karena tindakan itu dipanjang sebagai pengekangan kebebasan seseorang.”

Besaran pajak sebagai pendapat negara masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain bila menggunakan ukuran *tax ratio* (Ratio pajak dengan *Gross Domestic Product*). Target *tax ratio* untuk tahun 2024 berada pada rentang 9,95% hingga 10,20%. Peningkatan ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya pemerintah mengusulkan *tax ratio* tahun 2024 berada pada rentang 9,91% hingga 10,18%. Meskipun dinaikkan sedikit target ini masih lebih rendah dari realisasi *tax ratio* tahun 2022 yang mencapai 10,38% yang merupakan *tax ratio* tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 *tax ratio* berada pada angka 10,24%. Angka *tax ratio* merosot pada tahun 2020 menjadi 8,33%. Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat meskipun masih pada masa pandemic, *tax ratio* pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 9,11%. Pada tahun 2022, *tax ratio* kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38%. Untuk tahun 2023 pemerintah menargetkan *tax ratio* mencapai 9,61%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Di tahun 2022 Indonesia dengan 10,38% hanya lebih baik dari Laos 9,46%, Myanmar 5,78%, dan Brunei 1,30% serta jauh di bawah Thailand 17,18%, Vietnam 16,21% dan Singapura 12,96%.

Angka *tax ratio* Indonesia masih rendah ini salah satu penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan baru mencapai 84,07%. Jika dilihat berdasarkan jenis WP tingkat kepatuhan WP badan mencapai 61,27% sedangkan untuk WP OP Karayawan dan Non Karyawan mencapai 98,75% dan 45,53 angka ini menunjukkan masih ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara jika tingkat kepatuhan ditingkatkan lagi.

Gambar 2. Realisasi Anggaran Infrastruktur dalam APBN per April (2020-2024)



Realisasi anggaran infrastruktur Indonesia mencapai Rp 89,8 triliun hingga April 2024. Angka ini memenuhi 21,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menteri Keuangan mengatakan bahwa pertumbuhan realisasi anggaran April 2024 sangat tajam yakni 50,4% disbanding periode sebelumnya yang sebesar Rp 59,7 triliun. Adapun pos anggaran infrastruktur ini di antaranya untuk belanja Kementrian/Lembaga, Transfer ke Daerah, dan pembiayaan *below the line*. Belanja K/L menjadi pos realisasi infrastruktur yang paling besar yakni Rp 41,8 triliun pada April 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mendapatkan Rp 22,2 triliun, beberapa di antaranya untuk pembangunan jalan Rp 8,5 triliun; Rp 1,1 triliun untuk pembangunan jembatan,; untuk

pembangunan jembatan sebesar Rp 2,6 triliun; jaringan irigasi Rp 1,4 triliun; SPAM Rp 1 triliun, dan rusun sebesar Rp 800 miliar.

Kementrian lain, yakni Kementrian Perhubungan sebesar Rp 8,3 triliun. Beberapa di antaranya untuk pembangunan rel kereta api Rp 200 miliar; bandara Rp 800 miliar; dan pelabuhan laut Rp 1,6 miliar. Sementara Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merealisasikan sebesar Rp 4,2 triliun. Diantaranya untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp 1,6 triliun; data center nasional Rp 500 miliar; kapasitas satelit Rp 600 miliar; dan Palapa ring Rp 900 miliar. Kementrian Agama mendapatkan Rp 2,3 triliun diperuntukkan bangun gedung pendidikan tinggi Rp 900 miliar; prasarana madrasah Rp 800 miliar; prasarana perguruan tinggi keagamaan Rp 400 miliar. Lembaga lain, Polri mendapat Rp 1,9 triliun untuk membangun sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pos anggaran selanjutnya, yakni TKD sebesar Rp 17,4 triliun. Mayoritas untuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) infrastruktur daerah Rp 17,3 triliun. Pos terakhir pembiayaan *below the line* sebesar Rp 30,6 triliun. Dana ini untuk penyaluran pembiayaan perumahan melalui FLPP sebesar Rp 6 triliun dan PMN sebesar Rp 24,6 triliun.

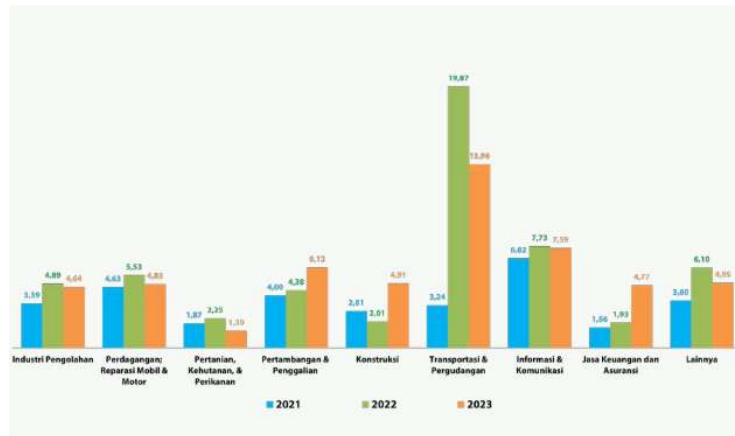
Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan, menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Dampak infrastruktur terhadap sektor ekonomi, pertama pada dunia usaha. Infrastruktur yang memadai berupa jaringan transportasi memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis di Indonesia. Infrastruktur pada transportasi yang berkualitas telah meningkatkan aksesibilitas pusat perbelanjaan. Akses yang lebih baik ke berbagai pusat komersial seperti di mal, pasar tradisional, dan kawasan bisnis telah memungkinkan warga dan dunia usaha mengakses tempat-tempat tersebut dengan lebih mudah dan efisien. Jaringan transportasi ini mempermudah dalam pendistribusian barang sehingga lebih cepat dan mudah sampai dengan produsen dan konsumen. Pelabuhan dan bandara yang baik menjadi pintu gerbang perdagangan internasional sehingga memungkinkan dapat memperlancar ekspor dan impor barang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kedua, dampak infrastruktur terhadap sektor manufaktur, ketersediaan pasokan energy yang stabil dan andal merupakan faktor kunci dalam berfungsinya industry manufaktur. Dengan infrastruktur pasokan listrik yang memadai, perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mengandalkan pasokan listrik secara terus menerus untuk menghindari gangguan pada proses produksi, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Sektor manufaktur yang berkembang juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian kebutuhan tenaga kerja di industry, semakin terbuka yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di keluarga.

Ketiga, terhadap dunia pariwisata. Industry pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Berkat infrastruktur yang mendukung seperti aksesibilitas yang lebih baik, akomodasi yang sesuai, dan ketersediaan daya Tarik wisata, industry pariwisata mampu tumbuh secara signifikan. Akses yang lebih baik terhadap tempat wisata dan pemandangan alam telah menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Infrastruktur teknologi juga mampu membantu dalam mempromosikan secara online terkait wisata tersebut. Oleh karena

Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

itu, pertumbuhan industri wisata ini juga menjadikan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang secara pesat.



Gambar 3. Pertumbuhan PDB beberapa Lapangan Usaha

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,96% diikuti jasa lainnya sebesar 10,52%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,01%. Sementara itu Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha ada dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 18,67%, diikuti perdagangan besar dan eceran; reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 12,94%; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,53%; pertambangan dan penggalian sebesar 10,52%, serta konstruksi sebesar 9,92%. Peran kelima usaha tersebut dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan, hal ini didukung dengan adanya pengelolaan dana pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai cara seperti pengampunan pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini penting karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang berdampak positif pada ekonomi, seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Namun, penerimaan pajak Indonesia masih rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara, salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan baru mencapai 84,07%. Peningkatan tax ratio menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pajak telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang, peningkatan daya saing sektor manufaktur melalui stabilitas pasokan energi, serta perkembangan pariwisata. Infrastruktur yang memadai juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05%, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, serta

penyediaan akomodasi dan makan minum. Struktur PDB Indonesia didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, yang perannya signifikan dalam pertumbuhan ekonomi berkat pengelolaan dana pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. “Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah.” *Cetakan Pertama*, 2013, 4.
- Anisa, Sabrina Nur, Septiana Aulia, Afeizka Indah, M. Arif Krui Dipa, and Maya Panorama. “Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang.” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2024): 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>.
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023.” *Www.Bps.Go.Id* No. 34/05/, no. 13 (2023): 16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>.
- Chendrawan, Tony S. “Sejarah Pertumbuhan Ekonomi.” *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 1 (2017): 123. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4441>.
- Fransiska, Nadia Rafi, and Mardhiah. “Analisis Pengaruh Pajak Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Bintan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Miftahul Umum* 1, no. 2 (2023): 51–55.
- Gede, I Komang, and Ni Putu Wiwin Setyari. *Kebijakan Fiskal Dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 13, 2020.
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, and Wiwiek Rindayati. “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 8, no. 1 (2020): 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>.
- Novitasari, Maya, and Lita Novitasari. “Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah.” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>.
- NSS, Rr. Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (2015): 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>.
- Perpajakan, Komite Pengawasan. *Penerimaan Perpajakan Tahun 2023* (2023).
- PWC. “Indonesian Infrastructure,” 2016. www.pwc.com/id.
- Saragih, Arfah Habib. “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia.” *Sikap* 3, no. 1

(2018): 17–27. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>.

Setiani, Ekil. “Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Sidoarjo Dan Dinas PU Bina Marga Kab, Sidoarjo).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 3 (2014): 447–51.

Setiyawan, Anang. “The Urgency of Defining Indonesia’s National Critical Infrastructure.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019): 164. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1673>.

T.S, Anggara, Dwi Resti Prratiwi, and Hikmatul Fitri. “Sekilas APBN.” *Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Pembangunan* 02 (2023): 2023.